



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 107 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang /2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/ 107 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN
 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
 ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA
 PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	dr. SILWANUS A SOEMOELE, SpOG (K).,M.H.Kes NIP 197106032000121004	Pengguna Anggaran
		BEATRICK ROMBE, S.E. NIP198912232011042002	Bendahara Pengeluaran
		VIVIAN ANDENITA GOBAI, S.IP NIP 198606032007012001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum
		SURYA DARMAN RITHO, S.T. NIP 198008072017121001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum
		ALFREDO MANASE ASMURUF, S.STP.,M.Si NIP 19860302 2004121001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Barang Dan Jasa
		MASRI MUKSIN, S.STP. NIP 199404152016091002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Barang Dan Jasa

		YOHANES YOU, S.Ag., M.Hum. NIP 197501142000031002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		EDWIN DEDA, S.E. NIP 197907052023111001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos NIP 196802131996101001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		MARYAM NGANGUN NIP 197705042009012025	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP 197606082002121002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum
		SITTI NURLAELA M PATURUSI, S.Hut. NIP 198110292023102001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
		MENASE KADEPA, S.E.,M.Si NIP 198205102010041003	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi
		MARIANA IYAI NIP 198608142018122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RITA DESSY FAUZIAH ANANDA, ST NIP 197412102006052002	Pengguna Anggaran
		HAMSYAH LAPALLU NIP 198502012010041002	Bendahara Pengeluaran
3.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dr. AGUS NIP 198008292008011011	Pengguna Anggaran
		MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md. KL NIP 198507292006052001	Bendahara Pengeluaran
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BERNARD SITORUS, ST NIP 197508032003121007	Pengguna Anggaran
		ALICE RITHA SARANGA, ST NIP 197104131997032006	Bendahara Pengeluaran
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POLPP	VICTOR FUN, S.Sos., M.Si NIP 197202181993011002	Pengguna Anggaran
		ULFA ROCHIMATUL ANDAIYAH, A.Md NIP 198010312008012011	Bendahara Pengeluaran

6.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEMI GOBAI, S.Sos NIP 197905022010011026	Pengguna Anggaran
		ANI DEGEI, S.Sos NIP 197708042011042002	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FRETS JAMES BORAY, S.E.,M.Si NIP 196702181989121002	Pengguna Anggaran
		SISILIA LIMBONG P, SE NIP 198404212011042002	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FRENCE THE PAPARA, S.IP., MAP NIP 197210131992031004	Pengguna Anggaran
		HERRY KAMISOPA, S.Sos NIP 197601202001121005	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si NIP 197310242000121002	Pengguna Anggaran
		ARLIN RATUNNA NIP 196905071992022002	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	YERIMIAS MOTE, S.STP., MIP NIP 198209052001121001	Pengguna Anggaran
		ANDRIS PANDENSOLANG NIP 19820403 201004 1 003	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS PERHUBUNGAN	WASHINGTON L. GAOL, M.Si NIP 197206201998031010	Pengguna Anggaran
		SUPARTI NIP 197901202015072001	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	HAM A. NAWIPA, S.SIT NIP 197604261991031008	Pengguna Anggaran
		NOVITA GOBAY NIP 199211302015112001	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	NORBETUS MOTE, SE, M.Si NIP 197311232005021003	Pengguna Anggaran

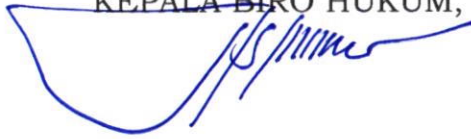
	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DANIEL INGGIRIK NIP 197207241996101001	Bendahara Pengeluaran
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	APNIEL PONGTULURAN, S.Kom., M.M. NIP 197904112005021005	Pengguna Anggaran
		MERYANTI PATALLE NIP 198203112015112001	Bendahara Pengeluaran
15.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JOHNI UKAGO, S.Sos NIP 197605102010041005	Pengguna Anggaran
		BERNADETA YOUW, S.E. NIP197706252006052001	Bendahara Pengeluaran
16.	SEKRETARIAT DPRD	Dr. MARTHA PIGOME, S.H., M.Hum. NIP 197503182006052002	Pengguna Anggaran
		FRANS JERYS, ST NIP 198106102015121001	Bendahara Pengeluaran
		SEPTINUS BARANSANO, S.Pd NIP 197010021997121001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		TITO HADI SUTRISNO, A.Md NIP 197907122006051002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		MAIKEL YOWAN DANOMIRA, S.STP NIP 198205222001121006	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		FRICE NIP 198002232023112001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	ELIESER YOGI, S.STP., M.Si NIP 198102182001121001	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD YUSUF NIP199204072011041001	Bendahara Pengeluaran
18.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YOHAN TONO TENOYE, SE NIP 197001291997011001	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO, ST NIP 199309072015011001	Bendahara Pengeluaran
		FARIDA WATUBUN NIP198207052023112001	Bendahara Penerimaan
		NICOLAS B.F. MAYOR, A.Md NIP 197111032000121003	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Nabire

		ALFANI WAHYU SEJATI, SE NIP 198409132023112001	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Nabire
		JOHN SROYER NIP 197406142009021002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Nabire
		ABIAN PEKEI, S.Sos NIP 197210071996101001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Paniai
		MURDIONO, SE NIP 198005072009041009	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Paniai
		FERDIAN NAWIPA NIP 197802022008011002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Paniai
		DANIEL PANCA PASANDA, AP, M.Si NIP 197604061994121002	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Timika
		ALFIAN ARMIN NIP 198510262015041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Timika
		YERIMIAS EDMADRIGO M. IYAI, S.Tr.IP NIP 200007302022081001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Timika
		AKHIR IRIBARAM, SE., MM NIP 196806121997121001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Mulia
		YOSEPH SEMUEL KREEUW NIP 198609192011041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Mulia
		SLAMET DARSONO NIP 197803112010011001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Mulia
19	BKPSDM	DENCI MERI NAWIPA, S.IP. NIP 197512272005022004	Pengguna Anggaran
		NOVITA FINCE ADII, S.IP NIP 199211172020102001	Bendahara Pengeluaran
20.	INSPEKTORAT	Drs. SAMUEL RIHI, M.Si NIP 196509151993071001	Pengguna Anggaran
		ERNA PURWATI, SE NIP 198502042015012002	Bendahara Pengeluaran
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ALBERTUS ADII, ST, M.Si NIP 197811152006051004	Pengguna Anggaran
		ALFRIDA SOMBA, S.T. NIP 198204302015032002	Bendahara Pengeluaran

22.	SEKRETARIAT MRP	DANIEL MAIPON, S.STP NIP197604231996121001	Pengguna Anggaran
		RONALD MUAL NIP 198009252015031002	Bendahara Pengeluaran

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002